



**Judul** : MKD Panggil Pelapor Azis  
**Tanggal** : Rabu, 19 Mei 2021  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 3

# MKD Panggil Pelapor Azis

MKD diminta terbuka memproses kasus Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR bersetuju untuk menindaklanjuti laporan terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Kesepakatan itu diputuskan setelah MKD menggelar rapat pleno pada Selasa (18/5) siang secara tertutup.

“Kita sudah sepakat, kita akan memanggil semua pelapor. Kita akan melakukan penyelidikan dengan waktu yang kita rencanakan dan ini akan berjalan secepatnya,” kata Ketua MKD DPR RI Aboe Bakar Alhabisy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5).

Aboe mengatakan, dari lima laporan yang masuk, tiga laporan di antaranya dinyatakan lengkap. Namun, dia tidak mengungkapkan secara pasti kapan MKD akan mulai memanggil para pelapor. “Dalam waktu dekat kami sudah mulai memanggil,” tjar anggota Komisi III DPR tersebut.

Sekretaris jenderal Partai Ke-

adilan Sejahtera (PKS) itu memastikan MKD belum akan memanggil Azis Syamsuddin. Untuk saat ini MKD baru akan memanggil para pelapor. “Kita tidak akan memanggil Pak Azis Syamsuddin dahulu sebelum selesai klarifikasi dengan pelapor,” katanya menegaskan.

Hingga kini, keberadaan Azis belum diketahui. Ia juga tak terlihat pada sidang paripurna pembukaan masa sidang DPR. Bahkan, Azis juga tak memenuhi pemanggilan KPK beberapa waktu lalu.

Anggota MKD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang, mengusulkan agar MKD DPR memprioritaskan laporan terhadap Azis Syamsuddin. “Saya sebagai salah satu anggota MKD akan meminta kepada rapat pleno MKD untuk dahlukkan aduan terhadap Azis agar masyarakat paham tentang fungsi dan tugas MKD dalam rangka sikapi aduan,” kata Junimart, Selasa.

Junimart mengatakan, MKD menerima sembilan laporan. Lima di antaranya

taranya laporan terhadap Azis Syamsuddin. “Tentu ini kami minta diverifikasi secepat mungkin karena ini sudah jadi konsumsi publik dan kita tidak mau desas-desus dan berita mengenai Azis menjadi bias,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil rapat pleno hari ini akan memutuskan akan memanggil Azis atau tidak. Ia menjelaskan, MKD bisa memeriksa laporan berdasarkan aduan dan memeriksa laporan tidak dengan aduan. “Sepanjang sudah jadi konsumsi publik dan tidak menjadi rahasia akan kami sikapi secepat mungkin dan dituntaskan di MKD,” ujarnya.

Junimart juga meminta MKD menggelar rapat secara terbuka untuk menindaklanjuti kasus yang menjerat politikus Partai Golkar itu. Keterbukaan rapat dan sidang diharapkan mempus kecurigaan terhadap netralitas MKD dalam perkara ini. “Saya minta supaya sidang MKD terbuka supaya masyarakat tahu apa yang kita lakukan. Jadi, *nggak ada kucing-kucingan di MKD*, kita terbuka sajalah,” katanya politikus PDIP ini menegaskan.

Sementara, Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar Supriansa menegaskan, pihaknya menghargai proses

hukum yang sedang berjalan terkait salah satu wakil ketua umumnya, Azis Syamsuddin. Baik kasus yang menjerat Azis di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun yang saat ini ditangani MKD DPR.

“Iya, kita hargai semua proses yang sedang berjalan terkait Pak Azis. Baik yang ada di luar maupun proses yang ada di dalam MKD,” kata Supriansa kepada *Republika*, Selasa (18/5).

Ia meyakini MKD diisi oleh kumpulan orang yang memiliki integritas tinggi. Ia menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada MKD.

“Tentu sangat profesional dalam penanganan pengaduan sesuai dengan tata beracara di MKD. Kita tunggu saja tahapannya berjalan dengan baik,” ujarnya. Partai berlambang pohon beringin juga masih melihat perkembangan kasus untuk mengambil sikap soal posisi Azis sebagai wakil ketua DPR.

“Kalau persoalan posisinya Pak Azis di DPR tentu ada mekanisme yang ada di Golkar melihat perkembangan kasus yang ada. Tunggu nanti pasti kita akan bertemu lagi nanti dalam rangka  *meng-update*  informasi lebih lanjut,” kata Supriansa. ■ ed: agus raharjo